

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- E. Fernando M. Manulang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta.
- Georg Sorensen, 2016, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustakapelajar, Yogyakarta.
- Majda El Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Muhtar Haboddin, 2016, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, UB Press, Malang.
- Nasrullah & Tantolailam, 2019, *Politik Hukum Pilkada & Desain Badan Peradilan Khusus*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Perter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soimin, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta.
- Titon Slamet Kurnia, 2022, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM*, P.T. Alumni, Bandung.
- Wilma Silalahi, 2021, *Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

### JURNAL

- Airlangga, S. P, Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis. *Humanus*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2019.

- Aswandi, B., & Roisah, K, Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019.
- Darussalam, F. I., & Indra, A. B, Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2021.
- Effendi, S, Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah. *Humanus*, Vol.10, No.1, Tahun 2011.
- Ermiyani, C, Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada UU No 24 Pasal 24 C ayat (1) Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Question Di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 3, Tahun 2020.
- Harahap, Zairin, Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2014.
- Hasibuan, Mila Marwiyah, Pendelegasian Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya*, Vol. 102, Tahun 2013.
- Ikhsan, S. A. N, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB*, Tahun 2021.
- Iza Rumesten, Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Tahun 2014.
- Konstitusi, M, Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Vol. 26, Tahun 2015.
- Muntoha, A, Demokrasi Dan Negara Hukum. *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 16, No. 3, Tahun 2009.
- Nanang Sri Darmadi, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Unissula*, Vol.XXXVIII, No 2, Tahun 2012.
- Nazriyah, Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, Tahun 2016.
- Nurhalimah, Siti, Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada, *ADALAH (Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 5. Tahun 2017.

Nurprojo, I. S, Bagongan, Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera, Belajar dari Purbalingga. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Riview*, 2016, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

Prasetyoningsih, N, Substansi Gagasan Dalam Beberapa Konsep Negara Hukum, *Nurani Hukum/Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Al-Bayyinah*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Santoso, S, Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi. Refleksi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2014.

Siallagan, Haposan,” Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia”, *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016.

Sutiyoso, B, Pembentu kan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Tahun 2016.

Suyatno, S, Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

Zoelva, H, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemiluakada Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10, No. 3, Tahun 2016.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang RI No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No 072-073/PUU-II/2004

#### **Internet**

<https://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

<https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

